

Nama : Vika Janfira

Npm : 221353040

Kelas : 2B

Analisis Soal

1. Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut ?

Menurut saya hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah dapat mengetahui Bagaimana cara memahami melindungi konstitusi dan sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian mengetahui upaya dan pencegahan yang dilakukan agar dapat menyelamatkan MK dari tekanan dan campur tangan politik terkait dengan revisi UU MK.

Hal yang harus dibenahi dari konsep berbangsa dan bernegara adalah :

- Meperkuat persatuan dan kesatuan internal bangsa indonesia
- Memberikan kebebasan dan kesempatan rakyat untuk mengemukakan pendapatnya dan ikut andil dalam penentuan kebijakan negara.
- Memberantas pakar politik yang berusaha menghasut MK dan mementingkan kepentingan golongannya daripada kepentingan negara.
- Menanamkan rasa nasionalisme dan menjunjung tinggi Hak dan Kewajiban Masyarakat.
- Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945 ?

Hakikat konstitusi bagi suatu negara adalah sebagai suatu peraturan yang sifatnya mengikat dan akan membuat masyarakat indonesia tunduk dan patuh terhadap peraturan dan hukum yang ada di Indonesia. Konstitusi merupakan peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi memuat norma-norma yang terkait dengan kehidupan bernegara, yang memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar dan otoritas negara tidak disalahgunakan. Konstitusi penting bagi negara karena mengatur kekuasaan, membatasi kekuasaan, merupakan tolak ukur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan petunjuk dan pedoman kepada para penerus bangsa untuk mengatur bangsa Indonesia dengan berpedoman pada UUD Republik Indonesia tahun 1945.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional ! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya ?

Contoh perilaku dari pejabat negara yang tidak konstitusional yakni korupsi. Banyak pejabat negara dan pemerintah yang melakukan korupsi, yaitu dengan memperkaya diri sendiri menggunakan uang negara yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan negara. Pada saat ini, banyak pejabat negara yang melakukan korupsi dan tidak mendapatkan balasan yang sesuai atas perbuatannya.

Menurut saya, para pejabat negara yang melakukan tindak korupsi layak mendapat hukuman yang maksimal dan setimpal. karena tindakan yang dilakukan para koruptor merugikan orang banyak yang berakibat kesengsaraan bagi rakyat. Seharusnya aparat hukum di Indonesia mengusut kasus korupsi ini sampai pada akar-akar permasalahannya. Karena korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara tidak sebanding dengan hukuman yang diberikan oleh pemerintah.